

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demokratia*”. Kata ini tersusun dari dua bagian, yakni “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” atau “*cratein*” yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara literal, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat.<sup>1</sup> Dengan kata lain, dalam sistem demokrasi, rakyat memegang otoritas tertinggi. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan aristokrat, monarki, birokrat, para ahli, ataupun pemimpin agama. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai dasar dan tujuan utama pemerintahan.<sup>2</sup>

Beberapa pakar memberikan definisi tentang demokrasi. Hans Kelsen berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dijalankan oleh para wakil rakyat yang telah dipilih, di mana rakyat percaya bahwa keinginan serta kepentingan mereka akan diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang pada dasarnya berlandaskan pada keinginan rakyat. Hal ini dikarenakan rakyatlah yang menjadi pionir berjalannya suatu pemerintahan dan sekaligus menjadi eksekutor melalui wakil-wakilnya untuk mencapai tujuan bersama. Demokrasi dapat digambarkan sebagai lingkaran

---

<sup>1</sup> Elpi Lutpiani, “Implementasi Demokrasi di Indonesia,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2021): 3.

<sup>2</sup> Suyatno Ladiqi and Ismail Suardi Wekke, *Gambaran Demokrasi: Demografi, Dan Perkembangan Muslim Minority View Project* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2018), hlm 34.

<sup>3</sup> Elpi Lutpiani, *op. cit.*, hlm. 3-4.

pemerintahan yang secara keseluruhannya dijalankan oleh rakyat dengan tugasnya masing-masing.

Sebagai sebuah negara demokrasi, setiap masyarakat dengan leluasa boleh berpartisipasi dalam politik. Bentuk partisipasi itu dapat dilakukan dengan mendukung pemerintah atau mengkritik pemerintah. Guna menunaikan tugas untuk mengkritik setiap kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah, para pengkritik dapat memberikan alternatif pemikiran dengan menjadi pihak oposisi. Oposisi dalam hal ini menjadi sangat penting karena dalam praktiknya mampu mengontrol dan sekaligus sebagai pengimbang kekuasaan, memastikan bahwa kepentingan mayoritas rakyat tetap terjaga, dan memperkuat sistem demokrasi karena menjadi corak atau model pemerintahan yang demokratis.

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, negara ini telah mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi sebagai bentuk tata kelola negaranya.<sup>4</sup> Seiring waktu, Indonesia telah mengalami empat periode demokrasi, yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, serta demokrasi yang saat ini masih berada dalam tahap transisi.<sup>5</sup> Secara historis, negara Indonesia sangat konsisten menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Alasan utama mengapa demokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik di Indonesia adalah karena demokrasi menegaskan bahwa sumber kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman ini, rakyat akan menciptakan aturan yang bertujuan untuk menguntungkan serta melindungi hak-hak mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya peraturan bersama yang menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menjamin serta melindungi hak-hak rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta memilih pemimpin mereka secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih.<sup>6</sup>

Namun dalam praktiknya, rakyat yang mengambil peran sebagai oposisi sering kali mengalami tantangan dan kendala yang cukup hebat. Hal ini disebabkan

---

<sup>4</sup> Agustya Panca P Zulfa M., Ananda Lisa P.S., Waziroh Nurul H., Aldy Nata M., "Demokrasi Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan, Departemen Teknik Universitas Airlangga* (2018): 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Ramon Kaban, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia," *Perspektif* 5, no. 3 (2000): 158.

oleh sikap semena-mena dari rezim yang sedang berkuasa dalam meloloskan segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah terbukti jauh lebih cakap dan proaktif dalam meredam kritik terhadap beberapa paket kebijakannya. Sebagai contoh, pada bulan April 2024, kepolisian menerbitkan sebuah peraturan yang memberikan wewenang kepada petugasnya untuk menangkap dan menuntut warga yang dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden atau pejabat pemerintah lainnya terkait penanganan COVID-19. Pelecehan dan penangkapan oleh kepolisian terhadap warga biasa, aktivis, dan tokoh-tokoh oposisi kemudian menjadi ciri yang mengkhawatirkan dan sangat menonjol dari penanggulangan pandemi pemerintahan Jokowi.<sup>7</sup>

Kedadaan ini diperparah dengan banyaknya sekutu illiberal yang mendukung kekuasaan Presiden Joko Widodo. Akibatnya, ia semakin tergodanya, terutama sejak dia terpilih kembali, untuk memperdalam praktik illiberal. Ketika protes meletus menjelang pelantikan periode keduanya, Presiden Joko Widodo menggunakan represi polisi dan kontrol internet yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Indonesia mengalami demokratisasi. Jokowi menggunakan kekuatan penuh aparat negara untuk melawan masyarakat yang menantang dan menyuarakan kritik terhadap pembagian kue kekuasaan yang dia rancang bersama sebagian besar elite politik Indonesia.<sup>8</sup>

Selain itu, bukti nyata yang paling mencolok dari pemerintahan Joko Widodo untuk membungkam para pengkritik sebagai bentuk pelemahan oposisi adalah dengan melakukan revisi UU ITE guna meminimalisir kritik publik. Di bawah kepemimpinan Jokowi, perlindungan hak warga negara atas kebebasan berekspresi telah mengalami kemunduran yang cukup serius. Reformasi perundang-undangan dan kecenderungan dalam penegakan hukum telah mengakibatkan peningkatan kriminalisasi atas kebebasan berbicara dan berserikat.<sup>9</sup> Setidaknya terdapat empat kelompok masyarakat yang sungguh merasakan betapa

---

<sup>7</sup> Thomas Power dan Eve Warburton, “Kemunduran Demokrasi Indonesia,” dalam *Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi?*, trans. Usman Hamid, Darmawan Triwibowo, dan Anita Wahid (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 2.

<sup>8</sup> Protes tersebut terkait dengan pengesahan RUU oleh parlemen dalam rangka melemahkan independensi komisi anti korupsi Indonesia, penghapusan standar kualitas lingkungan hidup dari regulasi industri pertambangan, dan pembatasan berbagai bentuk perbedaan pendapat politik tertentu. *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 364.

buruknya penerapan UU ITE, di antaranya ialah Jurnalis, anggota kelompok minoritas, cendekiawan, dan mereka yang dianggap bagian dari oposisi. Publik, dalam hal ini warga sipil, merasa semakin dianaktirikan oleh negara karena laporan tentang pelanggaran UU ITE sebagian besar diajukan oleh lembaga negara dan korporasi.

Ternyata pelemahan demokrasi tidak berhenti usai Presiden Jokowi menyelesaikan masa jabatannya. Kemunduran demokrasi masih terus berlanjut hingga saat ini, yang mana presiden Prabowo memimpin jalannya pemerintahan. Di era Prabowo, kemunduran demokrasi semakin menjadi-jadi tak kala disahkannya UU TNI yang baru. Pengesahan UU TNI yang baru ini memberikan perluasan kesempatan prajurit aktif TNI untuk berkecimpung di ranah sipil. Padahal, sistem yang dilatih dan diasah selama pendidikan seorang calon TNI berbeda dengan sistem dalam demokrasi. Militer sangat identik dengan komando, sedangkan dalam demokrasi diperlukan diskusi yang matang dalam mengambil keputusan. Jika militer bergerak di bidang sipil, prinsip-prinsip dalam demokrasi akan menjadi luntur.

Berdasarkan keprihatinan penulis akan situasi dan kondisi demokrasi yang kian hari kian luntur yang tampak dalam krisis eksistensi oposisi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik dan terdesak untuk mengkaji realitas kemunduran demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang di atas, penulis memberanikan diri untuk memberi judul skripsi ini: **MENYOAL EFEKTIVITAS OPOSISI DALAM MENGONTROL PEMERINTAHAN DI INDONESIA**. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga dan sekaligus memperkuat demokrasi di Indonesia sehingga demokrasi kita yang stagnan dan bahkan mengalami regresi itu dapat secara perlahan mengalami progres yang cukup stabil.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas peran oposisi dalam mengawasi jalannya

pemerintahan di Indonesia. Persoalan utama ini dijabarkan dalam beberapa masalah turunan berikut ini:

- 1) Mengapa kualitas demokrasi di Indonesia mengalami pelemahan? Karena tidak adanya oposisi? Budaya gotong-royong? Koalisi besar sehingga tidak terdapat *chack and balance*.
- 2) Apakah Indonesia mempraktikkan demokrasi tanpa liberalisme?

### **1.3 Metode Penulisan**

Dalam menggeluti skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan literatur yang bersumber dari buku, surat kabar daring, dan jurnal yang membahas tentang tema demokrasi secara umum dan konteksnya di Indonesia. Kemudian, penulis melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan bahwa oposisi di Indonesia mengalami disfungsi yang cukup serius dan akut.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tulisan ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pemahaman yang lebih mendasar dan luas tentang oposisi.
2. Untuk memahami sistem pemerintahan di Indonesia sebagai negara demokrasi.
3. Untuk mengkaji efektivitas oposisi di Indonesia.

Selain keempat tujuan di atas, penulis pun berharap agar tulisan ini mampu menyadarkan para pembaca akan pentingnya merawat demokrasi di negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita dituntut untuk tetap berpartisipasi

dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Sebab, tanpa kritik yang konstruktif dan rasional dari oposisi dalam negara demokrasi maka pemerintahan yang sedang berlangsung akan jatuh kepada otoritarianisme.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### 1. Kontribusi terhadap literatur akademik bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti pada literatur akademik terkait peran oposisi dalam sistem politik di Indonesia. Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para peneliti lain yang memiliki minat pada topik yang sama.

#### 2. Pemahaman lebih mendalam tentang oposisi kepada masyarakat

Penelitian ini akan membantu kita memahami lebih baik bagaimana pihak oposisi beroperasi, strategi yang mereka gunakan, dan dampaknya terhadap pemerintahan.

#### 3. Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah

Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan partai oposisi untuk meningkatkan efektivitas oposisi dalam mengawasi dan mengontrol pemerintahan.

#### 4. Penguatan demokrasi di Indonesia

Dengan memahami peran oposisi, kita dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dan memastikan adanya mekanisme *check and balances* yang efektif.

### **1.6 Struktur Organisasi Penulisan**

Keseluruhan tulisan ini mencakup lima bab. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan struktur organisasi penulisan yang memuat sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua penulis akan menyajikan gambaran umum tentang oposisi. Penulis akan menjelaskan definisi oposisi, jenis-jenis oposisi, sejarah oposisi di

Indonesia, peran dan fungsi oposisi, prinsip-prinsip beroposisi dalam politik dan peran masyarakat sipil dalam mengontrol negara.

Dalam Bab Ketiga, penulis akan mengulas secara komperhensif tentang sistem pemerintahan di Indonesia sebagai negara demokrasi. Penulis menyajikan pengertian pemerintahan, landasan hukum sistem pemerintahan, struktur sistem pemerintahan, dan dinamika sistem pemerintahan di Indonesia.

Sedangkan pada Bab Keempat, penulis akan menganalisis efektivitas oposisi di Indonesia. Pada bagian ini, penulis akan membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas oposisi. Menelaah Dominasi Pemerintah karena Oposisi menghadapi tantangan besar dalam melawan penguasa yang memiliki dukungan yang begitu kuat. Kemudian pada bagian akhir bab, penulis memberikan rekomendasi untuk penguatan oposisi di Indonesia.

Keseluruhan tulisan ini diakhiri dengan Bab Kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan atas keseluruhan tulisan dan juga saran-saran yang membangun kesadaran akan pentingnya oposisi dalam negara demokrasi seperti Indonesia.